

Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Kabupaten Mahakam Ulu



Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang, Long Bagun Mahakam Ulu

Kalimantan Timur

Website : mahakakamulukab.go.id

Email : info@mahakakamulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Mahakam Ulu “ Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan ”.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Ujoh Bilang, 22 Mei 2025

Bupati Mahakam Ulu



Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ditahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun 2024 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

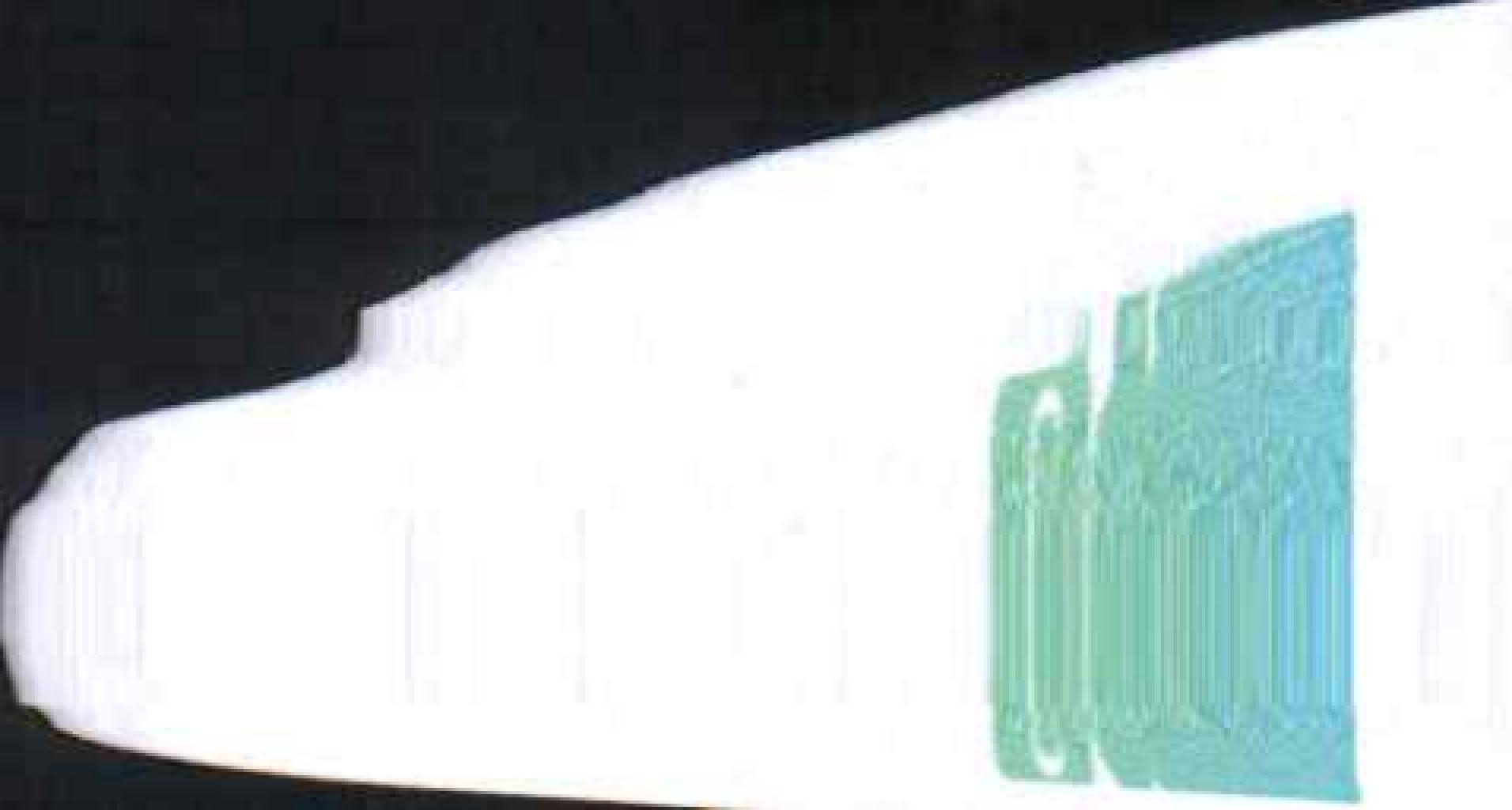
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	%	5
2.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri aliran bersih	Persentase capaian akses air minum layak	%	38,39
3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri Listrik	%	99,07
4.	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan layanan telekomunikasi	%	96.00
5.	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	22,43
6.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	71,88
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara	%	94,56
		Hasil pengukuran indeks kualitas Iahan	%	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	%	73,93
8	Meningkatnya peran sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan saha Pedagangan dan Pertanian (dalam art asa (dalam arti luas) (%)	%	19,26
9	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDNI/PMA) (dalam miliar)	Dalam Milyar	360
10	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	10,94
11	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	2,02
12	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Angka rata rata lama sekolah	Tahun	9
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,80
13	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup (tahun)	Tahun	72,50
14	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	72,64
15	Meningkatnya kinerja tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK (WTP)	Predikat	WTP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
16	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah desa maju	Kampung	12
		Jumlah desa tertinggal	Kampung	6





DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU	3
1. Luas Wilayah dan Letak Geografis	3
2. Topografi Kabupaten Mahakam Ulu	4
3. Hidrologi	5
4. Geologi	6
5. Klimatologi	8
6. Penggunaan Lahan	9
E. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	10
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	10
F. PERMASALAHAN UTAMA	13
G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	18
1. Visi	19
2. Misi	22
B. TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN	26
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	32



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA	35
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	38
C. PRESTASI KABUPATEN MAHKAM ULU	137
BAB IV PENUTUP	144
A. KESIMPULAN	144
B. UPAYA TINDAK LANJUT.....	145
LAMPIRAN	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024	32
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	36
Tabel 3.2	Perhitungan Penyerapan Anggaran	36
Tabel 3.3	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 Dan Tahun 2024	38
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	39
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	40
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	41
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	42
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	43
Tabel 3.10	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2023 Dan Tahun 2024	43
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	44
Tabel 3.12	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	44



Tabel 3.13	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Presentase Capaian Akses Air Minum Layak	46
Tabel 3.14	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Presentase Capaian Akses Air Minum Layak	47
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Presentase Capaian Akses Air Minum Layak	48
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik Tahun 2023 Dan Tahun 2024	48
Tabel 3.17	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	49
Tabel 3.18	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	49
Tabel 3.19	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik	50
Tabel 3.20	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik	51
Tabel 3.21	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Tujuan Presentase KK yang dialiri Listrik	51
Tabel 3.22	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Cakupan layanan Telekomunikasi Tahun 2023 Dan Tahun 2024	52
Tabel 3.23	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	53
Tabel 3.24	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	53
Tabel 3.25	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Cakupan Layanan Telekomunikasi	54



Tabel 3.26	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Cakupan Layanan Telekomunikasi	55
Tabel 3.27	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Cakupan Layanan Telekomunikasi	55
Tabel 3.28	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2023 Dan Tahun 2024	56
Tabel 3.29	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	57
Tabel 3.30	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	58
Tabel 3.31	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Rasio Rumah Layak Huni	59
Tabel 3.32	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Rasio Rumah Layak Huni	60
Tabel 3.33	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Rasio Rumah Layak Huni	60
Tabel 3.34	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2023 Dan Tahun 2024	61
Tabel 3.35	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	62
Tabel 3.36	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	62
Tabel 3.37	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Hasil	63
Tabel 3.38	Pengukuran Indeks Kualitas Air Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64
Tabel 3.39	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64



Tabel 3.40	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 Dan Tahun 2024	65
Tabel 3.41	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	66
Tabel 3.42	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	66
Tabel 3.43	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	67
Tabel 3.44	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	69
Tabel 3.45	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	69
Tabel 3.46	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 Dan Tahun 2024	69
Tabel 3.47	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	70
Tabel 3.48	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	71
Tabel 3.49	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	72
Tabel 3.50	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	73
Tabel 3.51	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	73
Tabel 3.52	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Tahun 2023 Dan Tahun 2024	74
Tabel 3.53	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	74



Tabel 3.54	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	75
Tabel 3.55	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian	76
Tabel 3.56	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian	77
Tabel 3.57	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian	77
Tabel 3.58	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Tahun 2023 Dan Tahun 2024	78
Tabel 3.59	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	78
Tabel 3.60	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	79
Tabel 3.61	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan	80
Tabel 3.62	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan	81
Tabel 3.63	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Tujuan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan	82
Tabel 3.64	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2023 Dan Tahun 2024	82
Tabel 3.65	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	83
Tabel 3.66	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	83



Tabel 3.67	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	85
Tabel 3.68	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	86
Tabel 3.69	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	86
Tabel 3.70	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Berkurangnya Angka Kemiskinan Tahun 2023 Dan Tahun 2024	87
Tabel 3.71	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Berkurangnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	87
Tabel 3.72	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Berkurangnya Angka Kemiskinan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	88
Tabel 3.73	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Berkurangnya Angka Kemiskinan	89
Tabel 3.74	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Berkurangnya Angka Kemiskinan	90
Tabel 3.75	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Berkurangnya Angka Kemiskinan	90
Tabel 3.76	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Dan Tahun 2024	90
Tabel 3.77	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	91
Tabel 3.78	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	92
Tabel 3.79	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	93



Tabel 3.80	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	94
Tabel 3.81	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	94
Tabel 3.82	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 Dan Tahun 2024	95
Tabel 3.83	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	95
Tabel 3.84	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	96
Tabel 3.85	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	97
Tabel 3.86	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Angka Rata-Rata Lama Sekolah	98
Tabel 3.87	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Angka Rata-Rata Lama Sekolah	98
Tabel 3.88	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 Dan Tahun 2024	98
Tabel 3.89	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	99
Tabel 3.90	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	99
Tabel 3.91	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Harapan Lama Sekolah	101
Tabel 3.92	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Harapan Lama Sekolah	102
Tabel 3.93	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Harapan Lama Sekolah	102



Tabel 3.94	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Umur Harapan Hidup Tahun 2023 Dan Tahun 2024	103
Tabel 3.95	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Tabel 3.95 Target Akhir RPJMD	103
Tabel 3.96	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Umur Harapan Hidup Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	104
Tabel 3.97	Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Umur Harapan Hidup	105
Tabel 3.98	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Umur Harapan Hidup	108
Tabel 3.99	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Umur Harapan Hidup	108
Tabel 3.100	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dan Tahun 2024	108
Tabel 3.101	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	109
Tabel 3.102	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	109
Tabel 3.103	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Indeks Kepuasan Masyarakat	111
Tabel 3.104	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Indeks Kepuasan Masyarakat	113
Tabel 3.105	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Indeks Kepuasan Masyarakat	113
Tabel 3.106	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Opini BPK Tahun 2023 Dan Tahun 2024	114
Tabel 3.107	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Opini BPK Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	115



Tabel 3.108	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Opini BPK Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	116
Tabel 3.109	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Opini BPK	117
Tabel 3.110	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Opini BPK	119
Tabel 3.111	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Opini BPK	119
Tabel 3.112	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Jumlah Desa Maju Tahun 2023 Dan Tahun 2024	120
Tabel 3.113	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Desa Maju Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	121
Tabel 3.114	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Desa Maju Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	122
Tabel 3.115	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Desa Maju	123
Tabel 3.116	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Desa Maju	124
Tabel 3.117	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Desa Maju	124
Tabel 3.118	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Desa Tertinggal Tahun 2023 Dan Tahun 2024	125
Tabel 3.119	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Desa Tertinggal Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	126
Tabel 3.120	Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Desa Tertinggal Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	126
Tabel 3.121	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan Serta Solusi yang Dilakukan Di Depan Desa Tertinggal	128
Tabel 3.122	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang) Desa Tertinggal	129



Tabel 3.123	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi) Desa Tertinggal	129
Tabel 3.124	Realisasi Anggaran Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024	131
Tabel 3.125	Tabel Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu	4
------------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah selama satu tahun anggaran. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menuju good government dan clean government itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamatkan agar setiap instansi pemerintah secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja Pemerintah Daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja



yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi



pemerintah. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2024. Pelaporan Kinerja adalah bentuk pelaporan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja menjadi salah satu media untuk mendapatkan masukan dari stakeholder atas kinerja Pemerintah Mahakam Ulu demi perbaikan kinerja mendatang. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam mencapai kinerja dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM

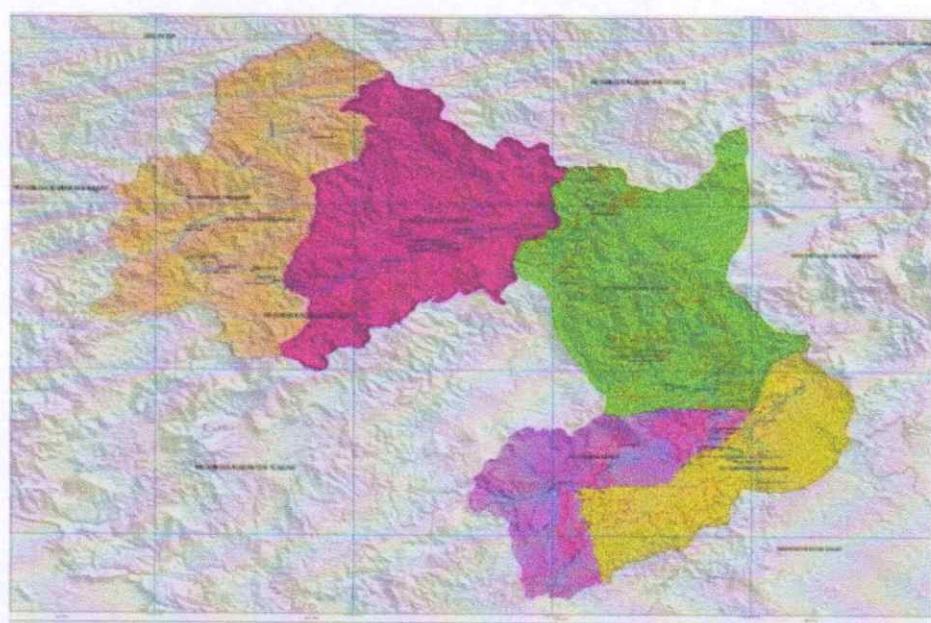
1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibu Kota Ujoh Bilang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Dengan luas sekitar 15.315 Km² atau kurang lebih 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kawasan perbatasan darat yang secara geostrategi merupakan pintu gerbang dari wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia (Serawak). Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah :

1. Sebelah Utara : Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh dan Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, serta Sarawak (Malaysia Timur);



2. Sebelah Timur : Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebelah Selatan: Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram dan Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung di Kabupaten Kutai Barat, serta Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung dan Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebelah Barat: Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

2. Topografi Kabupaten Mahakam Ulu

Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar 0 – 1.500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kemiringan



antara 0 – 25 persen. Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai pegunungan yang membujur dari Utara ke Selatan di bagian Barat Laut berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter dpl dengan kemiringan 30 persen. Pegunungan ini terjadi karena peristiwa geologi berupa lipatan dan sisipan sehingga bentuknya berjajal-jajal sejajar dengan garis pantai. Dengan kondisi fisiografi dan topografi yang demikian, maka pemukiman penduduk lebih banyak dijumpai di wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Mahakam dengan kondisi yang lebih datar. Kecamatan Long Bagun, Long Apari dan Long Pahangai berada pada ketinggian lebih dari 100 m dpl, sedangkan wilayah kecamatan lainnya sebagian besar terletak di bawah ketinggian 100 m dpl.

Daerah-daerah yang terjal sebagian besar terletak di wilayah bagian Utara yang meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Dengan kondisi topografi yang demikian, diharapkan wilayah di bagian utara menjadi pelindung bagi kawasan di selatan yang kondisi pembangunannya lebih berkembang

3. Hidrologi

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sepuluh sungai besar. Sungaisungai tersebut terdapat di seluruh kecamatan, di mana masing-masing kecamatan dialiri oleh dua sungai. Selain untuk pertanian, sungai juga menjadi alat transportasi yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain seperti Kabupaten Kutai Barat. Selain sungai, secara geologis diMahakam Ulu juga terdapat empat gunung : tiga diantaranya terdapat di Kecamatan Long Apari; dan satu di Kecamatan Long Hubung. Dari keempat gunung tersebut, gunung Tukon Pohan merupakan gunung tertinggi yaitu 1.417 mdpl sedangkan gunung Len yang terdapat di Kecamatan Long Hubung merupakan gunung terendah dengan ketinggian 659 mdpl.



Keberadaan sepuluh sungai di Kabupaten Mahulu berpotensi sebagai sumber air baku air bersih atau air minum. Potensi ini merupakan potensi besar untuk menyediakan sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih maupun air minum.

4. Geologi

Struktur geologi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh batuan sedimen liat berlempung. Di samping itu terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kquarter. Formasi batuan endapan utama terdiri dari batuan pasir kwarsa dan batuan liat. Dari struktur geologi, di daerah ini banyak dijumpai patahan dan lipatan yang pada umumnya terdapat di wilayah pantai. Beberapa formasi geologi di Provinsi Kalimantan Timur antara lain utamanya Palau Balang Beds, Balikpapan Beds, Pemaluan Beds dan Kampung Baru Beds.

Komposisi sifat tanah dan karakteristik lingkungan fisik lahan merupakan instrumen utama dalam menilai potensi sumberdaya lahan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pengembangan basis data unit lahan secara simultan diturunkan dari unit parameter dan/atau komposisi sifat fisik kimia tanah uji analisis laboratorium dan karakteristik fisik lingkungan lahan atas pertimbangan dasar karakteristik tingkat homogenitas dan kompleks lahan sebagai informasi in-situ. Satuan peta tanah Kabupaten Mahakam Ulu menurut kegiatan Kajian Masterplan Pertanian Kutai Barat telah mempertimbangkan parameter (i) elevasi lahan, (ii) batuan utama pembentuk tanah, (iii) sebaran jenis tanah, dan (iv) tingkat kelerengan.

Potensi lahan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat diketahui dari hasil evaluasi tingkat kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah dalam menyediakan kondisi lingkungan untuk mendukung pertumbuhan optimal tanaman. Kesuburan tanah ini merupakan hasil kombinasi dari tiga sifat utama tanah, yaitu sifat fisik,



kimia dan biologi. Dalam pelaksanaan evaluasi lahan umumnya status kesuburan tanah didekati berdasarkan kombinasi dari lima sifat kimia tanah utama yang sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu kapasitas tukar kation (KTK), kejenuhan basa (KB), kandungan P total, kandungan K total, dan kandungan C-organik tanah.

Kriteria penilaian sifat kimia tanah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Analisis Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk (Balai Penelitian Tanah, 2005). Hasil penilaian sifat-sifat kimia tanah dan status kesuburan tanah Kabupaten Mahakam Ulu dapat merujuk pada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Data kesuburan yang digunakan bersumber dari data sekunder hasil survei kegiatan penyusunan masterplan pertanian Kabupaten Kutai Barat. Selain tujuan praktikal untuk penentuan status kesuburan tanah, penilaian sifat-sifat kimia-fisik tanah digunakan pula untuk mengetahui kadar dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bahwa secara umum tanah-tanah di Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai status kesuburan sangat rendah. Hal ini disebabkan tanah-tanah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar berasal terutama dari bahan induk sedimen yang bersifat masam dan bertekstur pasir. Rendahnya tingkat kesuburan tanah dicirikan oleh kandungan fosfat tersedia yang rendah, dan kadar unsur hara esensial N dan K yang rendah sampai sangat rendah. Pada daerah bergelombang dan berbukit umumnya solum tanah dangkal sampai sedang dangkal sampai sedang dan di beberapa tempat ditemukan batuan di permukaan.

Untuk daerah yang sesuai bila diusahakan sebagai lahan pertanian dengan hasil optimal diperlukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, seperti pemupukan dan penambahan bahan organic. Selain kesuburan tanah rendah, faktor lain yang akan membatasi



kesesuaian lahan adalah kemiringan lereng yang umumnya berbukit dan bergunung, terutama di bagian utara, yaitu di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Faktor ini terkait erat dengan potensi erosi yang dapat terjadi apabila lahan dengan kemiringan curam diusahakan untuk areal pertanian tidak disertai dengan tindakan konservasi tanah yang memadai.

5. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori iklim tropika humida dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan April dan terendah di bulan Agustus serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Karena terletak di daerah khatulistiwa, maka iklim Kabupaten Mahakam Ulu dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei - Oktober. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September. Meskipun demikian, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan yang jauh lebih panjang.

Temperatur rendah terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari, sedangkan temperatur tinggi terjadi antara bulan Agustus sampai dengan bulan September. Secara umum Kabupaten Mahakam Ulu beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 25°C sampai dengan 35,8°C dengan rata-rata 28°C. Selain itu sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang luas, Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai



kelembaban udara relatif tinggi. Kelembaban udara paling rendah sebesar 49 persen yang dipantau melalui Stasiun Meteorologi Samarinda, sedangkan yang paling tinggi sebesar 97 persen dengan rata-rata 93 persen yang terpantau di Stasiun Meteorologi Balikpapan. Kedua stasiun tersebut merupakan stasiun klimatologi terdekat dari Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Penggunaan Lahan

Kondisi penutupan lahan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu secara umum merupakan penutupan vegetasi, hanya saja vegetasi hutannya sudah berkurang sangat banyak bila dibandingkan dengan kondisi tiga dekade sebelumnya. Sebagian besar hutannya sudah mengalami kegiatan pembalakan hutan dengan jumlah pohon yang semakin menurun. Sementara itu, hutan-hutan yang belum mengalami kegiatan pembalakan hutan terletak di wilayah pegunungan atau di wilayah sebelah Utara. Hutan yang masih hijau termasuk dalam status hutan lindung.

Sementara itu, tutupan lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar umumnya berada di hutan produksi. Hutan yang masih hijau termasuk hutan konservasi maupun hutan lindung ini kurang lebih berkisar 668.821 Ha dengan hutan tanaman sekitar 12.092 Ha, dari yang seharusnya berupa _awasan hutan ± 758.526 Ha. Hutan produksi memiliki luas ± 107.316 Ha. Lahan yang berupa hutan sekunder dan semak belukar seluas ± 1.020.529 Ha dan rawa-rawa seluas 152 Ha. Kawasan hutan produksi seharusnya menjadi _awasan hutan produktif, namun kenyataan di lapangan hanyalah berupa hutan sekunder ataupun semak belukar.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi kawasan hutan, yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 668.821 Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 556.185 Ha dan kawasan hutan produksi seluas 107.316 Ha, sehingga luas total kawasan hutan adalah 86,99 persen dari luas Kabupaten. Hutan lindung di Kabupaten



Mahakam Ulu sebagian besar masih didominasi oleh vegetasi alami yang terdapat di daerah hulu sungai Mahakam dan merupakan daerah tangkapan air (catchment area). Hutan produksi terbatas masih didominasi oleh vegetasi alami yang keberadaannya tersebar di wilayah Utara, sedangkan hutan produksi yang keberadaan vegetasinya terdiri dari tanaman kayu dan semak belukar juga terletak di sebelah Utara.

E. PENJELASAN STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu Pemerintah Daerah yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, evaluasi dan pengawasan pembangunan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas :



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan bidang pertanian;
5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian sosial;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang perizinan;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
9. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;



10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan pariwisata, pemuda dan olahraga;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan bidang kebakaran; dan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan bidang persandian.
- e. Dinas Daerah yang terdiri atas :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan fungsi penunjang aset daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan;
 4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. Pengelola Perbatasan Daerah, Tipe B melaksanakan penunjang pengelola perbatasan daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan



7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe B melaksanakan penunjang penanggulangan bencana daerah.
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Long Apari dengan Tipe B;
 2. Kecamatan Long Pahangai dengan Tipe B;
 3. Kecamatan Long Bagun Kota dengan Tipe B;
 4. Kecamatan Laham dengan Tipe B; dan
 5. Kecamatan Long Hubung dengan Tipe B.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Berikut bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perencanaan pembangunan didasarkan pada analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan arah kebijakan di masa depan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa depan untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan diperoleh dari gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (strength) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weakness) yang belum di atasi, peluang (opportunity) yang belum dimanfaatkan dan ancaman (threat) yang belum di antisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan



kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi serta masih terbatasnya penyediaan lapangan kerja. Dampak wabah Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin dan tingginya pengangguran akibat menurunya perekonomian serta penyempitan lapangan kerja;
2. Ketidakstabilan pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi masyarakat yang cenderung meningkat;
3. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
4. Pembangunan Infrastruktur yang belum merata sehingga berdampak kepada akses ke Kabupaten Mahakam Ulu yang sulit sehingga berdampak kepada angka inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan tidak meratanya kemampuan aksesibilitas desa-desa untuk mengakses internet;
6. Rendahnya kemampuan daerah dalam hal kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap permasalahan-permasalahan dan tantangan terkini yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki prioritas pembangunan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pengembangan sektor potensial (pertanian, perdagangan, jasa serta industri) dan peningkatan iklim investasi serta perluasan kesempatan kerja;
2. Pengentasan kemiskinan ekstrem;
3. Peningkatan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata;



4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial;
5. Mahakam Pembangunan Infrastruktur terutama untuk aksesibilitas menuju Kabupaten Ulu; dan
6. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah :

- Bab I** **Pendahuluan** menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
- Bab II** **Perencanaan Kinerja**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III** **Akuntabilitas Kinerja**
Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Realisasi anggaran menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana pembangunan Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Mahakam Ulu yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Mahakam Ulu pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*), guna merealisasikan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapain dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan



internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026.

RPJMD Mahakam Ulu sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat, yang akan dicapai dalam periode 2021 – 2026. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Mahakam Ulu juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan dan sasaran program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RPJMD Mahakam Ulu sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat, yang akan dicapai dalam periode 2021 – 2026. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Mahakam Ulu juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan dan sasaran program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan



prediksi kemampuan sumber daya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mahakam Ulu juga menjadi acuan dalam perumusan visi jangka menengah ini. Maka rumusan Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 adalah :

VISI 2021 – 2026
MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA
SEJAHTERA BERKEADILAN

Visi tersebut mengandung dua unsur pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, pada tahun 2024, yaitu “Sejahtera” dan “Berkeadilan”. Pokok Visi “Sejahtera” dan “Berkeadilan” menunjukkan dua kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Makna terinci dari kedua pokok visi di atas disajikan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Nilai atau Pokok dan Penjabarannya

No	Nilai-Nilai/ Pokok Pokok Visi	Penjabaran
1.	Mahulu Untuk Semua	Mahulu adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah administratif dan geografis setingkat kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk Semua" mengandung arti bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu diberikan kesempatan yang berpartisipasi dan seluas-luasnya menikmati untuk hasil-hasil pembangunan tanpa diskriminasi, baik wilayah, agama, ras, etnis, kondisi fisik dan gender.
2.	Sejahtera	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah bahwa masyarakat Mahakam Ulu melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman, dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Mahakam Ulu. Untuk



		<p>merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Mahakam Ulu akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Mahakam Ulu memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Mahakam Ulu.</p>
3.	Berkeadilan	<p>Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026 mengedepankan pada konsep pembangunan berkeadilan. Pembangunan akan lebih fokus pada program-program dalam rangka memperkecil ketidakmerataan/ketimpangan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah ibu kota pemerintahan saja, akan tetapi pemerataan pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh wilayah penyangga Kabupaten Mahakam Ulu serta daerah terluar (perbatasan) sesuai dengan konsep pembangunan pada RTRW. Mahakam Ulu memandang paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, selanjutnya Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi</p>



		<p>yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan yang merata diyakini merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu. Diharapkan dengan konsep pembangunan yang berkeadilan, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan perekonomian Mahakam Ulu.</p>
--	--	--

Sumber : RJMD Tahun 2021 – 2026

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembangunan yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Mahakam Ulu. Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 sudah selaras dengan visi RPJMN 2020 - 2024 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023.

2. MISI

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan /dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

1. **Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan adil memiliki makna Pembangunan ke depan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan



masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam ulu sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional dikarenakan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang, dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2. Meningkatkan memanfaatkan taraf hidup potensi masyarakat sumberdaya dengan alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local

Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu secara bijak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan



pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang keliling. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Mahakam Ulu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Mahakam Ulu meningkat dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Mahakam Ulu dengan mengusung konsep Ecotourism berbasis budaya yang merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengedepankan kebudayaan dan kearifan lokal akan mencoba menjadikan pariwisata sebagai salah satu unsur pendorong ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata, akan



bermunculan industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi.

Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, tindak pidana dan lainlain). Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat. Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan



berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Visi dan misi pembangunan jangka



menengah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran serta terdapat 18 (delapan belas) indikator dan target pembangunan per tahun yang diletakkan beriringan pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun 6 (enam) tujuan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indek Gini Menurun Dari 0,259 menjadi 0,214 Diakhir Periode	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	27,45%	56,36%	13,07%	5%	5%	5%	60,52%
				Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	24,00%	28,19%	31,39%	34,89%	38,39%	42,09%	45,99%
				Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Persentase KK yang dialiri listrik (%)	95,78	99,74	99,5	99,7	99,7	99,9	99,9
				Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	84,00%	87,00%	90,80%	94,00%	96,00%	98,00%	99%
				Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	15,43%	16,43%	18,43%	20,43%	22,43%	24,43%	26,43%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dari 80,12 menjadi 84,18 di akhir periode	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	77,90	50	61,88	66,88	71,88	79,38	86,88	86,88	
					Hasil Pengukuran van Indeks kualitas Udara	82,78	93,98	92,56	93,56	94,56	96,06	97,56	97,56	
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	79,00	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memperdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dari - 0,26 Menjadi 5,23 Diakhir Periode	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75,18	74,71	74,53	74,23	73,93	73,63	73,33	73,33
					Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	17,53	18,66	19,18	19,22	19,26	19,31	20,31	20,31
					Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDNP MA) (Dalam Miliar)	2.815	*2.694,9 79.781,5 00	*351,33 4.825,0 00	350	360	365	370	370

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	
			PDRB Per Kapita meningkat dari 104,60 Menjadi 116,60 Di Akhir Periode	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,44	11,90	11,55	11,39	10,94	10,50	10,09
		pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,14	2,44	2,22	2,02	1,83	1,72
3.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan Berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama sekolah	7,97	8,81	8,36	8,46	9,00	9,21	9,26	9,26
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkat dari 67,09 71,82 Diakhir Periode	Harapan Lama Sekolah	12,51	12,61	12,62	12,70	12,80	13,00	13,20	13,20
			Menyekolahkan Masyarakat	Menyekolahkan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,33	72,35	72,49	72,64	72,78	73,15
												73,15

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target					Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	
4.	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat dari C Menjadi B Diakhir Periode	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	93,34	n/a	98,44	98,54	98,64	98,74
					Meninjau kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	6	7	8	10	12	15
						Jumlah Desa Tertinggal	14	14	8	7	6	4
										2	2	



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya koneksi antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jarn)	%	5
2.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri aliran bersih	Persentase capaian akses air minum layak	%	28
3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri Listrik	%	96,01
4.	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan layanan telekomunikasi	%	96.00
5.	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	22,43



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	64,91
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara	%	93,12
		Hasil pengukuran indeks kualitas Iahan	^%	100
7.	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	%	75,80
8.	Meningkatnya peran sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Pedagangan dan Jasa (dalam arti luas) (%)	%	21,19
9.	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDNI/PMA) (dalam miliar)	Dalam Milyar	3.168,217
10.	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	9,83
11.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	3,33
12.	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Angka rata rata lama sekolah	Tahun	8,87
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,10
13.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup (tahun)	Tahun	72,50
14.	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	72,25
15.	Meningkatnya kinerja tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK (WTP)	Predikat	WTP
16.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah desa maju	Kampung	8
		Jumlah desa tertinggal	Kampung	11

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu fondasi utama dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas adalah dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Salah satu kewajiban mempertanggungjawabkan instansi keberhasilan pemerintah ataupun adalah kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang termasuk dalam akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa, capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



A. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Performance Gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Percentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Hasil dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Kemudian pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perhitungan Penyerapan

Keterangan	Rumus
Penyerapan Anggaran	$\text{Penyerapan Anggaran (PA)} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100$

Sumber : bps



Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator). Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut.

Efisiensi merupakan tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam artian bahwa efisiensi berarti memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya. Rumus dalam penghitungan efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterangan	Rumus
Efisiensi	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}}$

Keterangan :

1. Apabila nilai efisiensi kurang dari 1 maka tidak efisien
2. Apabila nilai efisiensi 1 maka impas
3. Apabila nilai efisiensi lebih dari 1 maka efisien



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5	17,3	29%	5%	42,9	58%

Sumber Data : Dinas PUPR

Konektivitas antarwilayah memiliki peran penting dalam perkembangan suatu negara. Ini mengacu pada terhubungnya wilayah-wilayah dalam suatu negara melalui berbagai sarana transportasi dan infrastruktur. Di Indonesia, upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dilakukan dengan berbagai cara, seperti :

- a. Pembangunan Infrastruktur : Pemerintah membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan angkutan masal seperti MRT untuk menghubungkan wilayah-wilayah. Ini membantu memeratakan pembangunan dan memfasilitasi mobilitas penduduk.
- b. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah : Konektivitas antarwilayah memudahkan akses dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ini memungkinkan pengembangan wilayah demi kesejahteraan masyarakat.
- c. Akses Sumber Daya: Konektivitas memudahkan akses sumber daya dan produk dari tempat asalnya ke wilayah lain. Misalnya, barang dan sumber daya dapat dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain.



- d. Peningkatan Pelayanan Umum: Konektivitas antarwilayah juga berdampak pada pelayanan umum. Ini termasuk pasokan air bersih, aliran listrik, Pengelolaan sampah, pendidikan, Kesehatan dan keamanan.

Dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, kita dapat memperkuat ekonomi, meratakan pembangunan, dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Kondisi baik ini penting untuk memastikan mobilitas dan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota. Semoga upaya pemeliharaan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap baik dan aman bagi pengguna.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja antara tahun 2024 dengan 2023 adalah mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka 17,3% dengan target 5% sehingga capaiannya adalah sebesar 29%. Sedangkan pada Tahun 2024 realisasi kinerja berada di angka 42,9% dengan target 5% sehingga capaiannya adalah sebesar 58%.

Tabel 3.5 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5	42,9	58%	5	58%

Sumber Data : Dinas PUPR

Berdasarkan tabel diatas Capaian Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 58% dengan target akhir RPJMD sebesar 5% dan realisasi pada tahun 2024 berada di angka 42,9% capaiannya berada diangka 58%.



Tabel 3.6 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	42,9	58%	97	60.00%

Berdasarkan tabel diatas capaian presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 60,00% dengan angka nasional berada di angka 97% sedangkan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu berada di angka 42,9% sehingga capaian sebesar 60%.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian			
1.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5	42,9	58%	<p>1. Intervensi anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan dapat membantu dalam pembangunan jalan karena kebutuhan pembangunan jalan diperlukan untuk konektivitas antar daerah, pembangunan jalan kabupaten difokuskan di daerah ibu kota kabupaten untuk prioritas lima tahun ini.</p> <p>2. Pembangunan di Ibu kota kabupaten difokuskan karena lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku dibandingkan dengan zona 1 atau zona 2</p> <p>3. Pembangunan jalan dan jembatan juga diberikan bantuan oleh pusat melalui APBN dengan DAK Bankeu dengan pembangunan Zona 3 untuk kawasan prioritas nasional.</p>	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam mem kinerja. Analisis keberhasilan untuk Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) adalah :

- a. Diperlukan adanya intervensi anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan dapat membantu dalam pembangunan jalan. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan merupakan aspek krusial dalam peningkatan konektivitas antardaerah. Pembangunan jalan kabupaten difokuskan di daerah ibu kota kabupaten untuk prioritas lima tahun ini.
- b. Pembangunan difokuskan di daerah ibu kota kabupaten karena lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku dibandingkan dengan zona 1 atau zona 2
- c. Pembangunan jalan dan jembatan diberikan bantuan oleh pusat melalui APBN dengan DAK Bankeu dengan pembangunan Zona 3 untuk kawasan prioritas nasional.

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5	42,9	58%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Berdasarkan dengan hasil analisis dapat diberikan kesimpulan bahwa Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik menunjang Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar wilayah kecamatan.

Adapun program-program yang menunjang indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Program Pengelolaan Penerbanga

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	0,08%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam). Indikator kinerja sasaran Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik tidak efisien dalam penggunaan sumber dayanya dengan tingkat efisiensi sebesar 0,08%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga yang teraliri aliran bersih

Tabel 3.10 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	27	37,95	140.56%	28,00	48,6	173.6%

Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses teraliri air bersih merupakan langkah positif dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Akses air minum merujuk pada air yang berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pergi-pulang (PP), termasuk waktu antrean. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari Perusahaan Air Minum (PAM), mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Meskipun ada peningkatan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan semua rumah tangga di



Indonesia memiliki akses air minum yang layak dan aman. Persentase capaian akses air minum layak di Indonesia mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang memadai dan aman. Berdasarkan dengan data di atas, Realisasi kinerja Persentase Capaian akses air minum layak pada tahun 2024 dengan target 28,00% realisasinya adalah sebesar 48,6% dengan capaian sebesar 173.6% sedangkan pada Tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 140.56% dengan rincian target sebesar 27% dengan realisasi mencapai 37,95%.

Tabel 3.11 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	28,00	48,6	173.6%	38,39	126,6%

Persentase Capaian akses air minum layak tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 126,6% dengan target akhir RPJMD sebesar 38,39% dan realisasi kinerja pada tahun 2024 berada di angka 48,6% sehingga capaianya berada di angka 126,6%.

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	28,00	48,6	173.6%	100	206%

Persentase Capaian akses air minum layak baik pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 206%. Hal ini didapat dari realisasi capaian 2024 berada di angka 48,6% dengan target nasional berada diangka 100% sehingga capaiannya sebesar 206%.

Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Analisis			Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaiان (%)	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga yang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	28,00	48,6	173,6%	<p>1. Meningkatkan kapasitas air SPAM, perpipaan, non perpipaan.</p> <p>2. Membentuk UPT Air Minum untuk memudahkan koordinasi kegiatan air SPAM</p> <p>3. Mengalokasikan anggaran untuk pengelolan SPAM</p> <p>4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung.</p>



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis untuk Persentase Capaian akses air minum layak adalah :

1. Meningkatkan kapasitas air SPAM, perpipaan, non perpipaan;
2. Membentuk UPT Air Minum untuk memudahkan koordinasi kegiatan air SPAM;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan SPAM;
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung.

Analisis di atas adalah berdasarkan capaian kinerja yang berhasil meraih target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	28,00	48,6	173.6%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Akses Air minum Layak menunjang sasaran meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri aliran bersih. Adapun program yang menunjang indikator kinerja sasaran adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.



Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga yang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	47,02%	Efisen

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya Capaian Akses Air Minum Layak. Persentase Capaian akses air minum layak efisien dalam penggunaan sumber dayanya dengan tingkat efisiensi sebesar 47,02%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 3.16 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,93	28.65	29.87%	96,01	10.90	11.35%

Di era modern ini, fenomena meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik menjadi sebuah gambaran yang mencerminkan perkembangan sosial dan teknologi. Transformasi ini membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dari segi kenyamanan namun juga pertanda terciptanya aksesibilitas energi yang lebih merata. Kehadiran listrik di rumah tangga memberikan manfaat yang tak terbantahkan. Seiring meningkatnya cakupan ini, kualitas hidup meningkat secara keseluruhan.



Persentase Rumah Tangga yang Dialiri Listrik di Indonesia menggambarkan sejauh mana akses listrik telah menjangkau masyarakat. Pada tahun 2024 target kinerja berada di angka 96,01% dengan realisasi kinerja berada di angka 10.90% sehingga capaiannya berada di angka 11.35%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja berada di angka 28.65% dengan target 95,93 % dengan capaian sebesar 29.87%.

Tabel 3.17 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	96,01	10.90	11.35%	99.7	11%

Pada tabel diatas Capaian Persentase KK yang dialiri Listrik pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 11% dikarenakan target akhir RPJMD berada di angka 99,7% dan realisasi tahun 2024 berada di angka 10.90% sehingga capaiannya sebesar 11%.

Tabel 3.18 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	96,01	10.90	11.35%	100	11%

Pada tabel diatas Capaian Presentase KK yang dialiri Listrik pada Tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 11% dengan angka nasional berada di angka 100% sedangkan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu berada di angka 10.90% sehingga capaian sebesar 11%.

**Tabel 3.19 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan
serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaiian		
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	96,01	10.90	11.35%	Rumah yang teraliri listrik di Kabupaten Mahakam Ulu dibagi menjadi 3 yakni dari PLN, Kampung, komunal, dan mandiri. Penghitungan yang dimiliki oleh DPUPR untuk rumah tangga adalah yang bersumber dari PLN dan komunal sekitar 1.158 KK dan masih jauh apabila dibandingkan dengan jumlah KK di Mahakam Ulu sebanyak 12.519	Perlu dilakukan perhitungan ulang terkait dengan jumlah KK yang teraliri listrik baik yang bersumber dari PLN ataupun listrik mandiri sehingga dalam proses Ke Depannya, DPUPR dapat memetakan wilayah yang menjadi prioritas dalam penyaturan listrik Ke Depannya.



Tabel 3.20 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	96,01	10.90	11.35%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian KK yang dialiri Listrik menunjang sasaran kinerja meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik dengan realisasi sebesar 10.90% dan target 96.01% sehingga capaiannya berada di angka 11.35%.

Tabel 3.21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	86%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya KK yang dialiri listrik. Persentase KK yang dialiri Listrik efisien dalam penggunaan sumber daya sumber daya dengan angka 86%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Tabel 3.22 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

	Sasaran	2023	2024



No		Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	94	94,64	101%	96.00	97.07	101.1%

Sumber Data : Dinas Kominfostandi

Dalam era informasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa jaringan telekomunikasi dan internet menjadi tulang punggung bagi kemajuan teknologi dan sosial. Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan ini mencerminkan pergeseran global menuju masyarakat yang terhubung secara digital.

Transformasi ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konektivitas yang lebih baik hingga perubahan pola pikir dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar.

Penggunaan internet di Indonesia telah meningkat hampir empat kali lipat dalam dekade terakhir, setengah dari populasi orang dewasa Indonesia masih belum dapat mengakses internet. Selain itu, hampir semua pengguna internet di Indonesia mengakses melalui perangkat seluler. Meskipun internet seluler (3G atau 4G/LTE) menjadi layanan yang paling banyak digunakan di Indonesia, masih tidak setara dengan internet kabel, baik dalam hal kapasitas, kualitas layanan, kinerja bandwidth tinggi, dan efisiensi biaya sehingga cakupan layanan telekomunikasi menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia di era informasi digital.

Pada tahun 2024 target kinerja yang telah ditetapkan adalah 96.00% dengan realisasi kinerja adalah 97.07% sehingga capaianya sebesar 101.01% sedangkan pada tahun 2023 target kinerja berada di angka 94% dengan realisasi kinerja sebesar 94,64% sehingga capaian kinerja tahun 2023 juga berada di angka 101%.



Tabel 3.23 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	96.00%	97.07%	101.1%	96.00	101.1%

Capaian Cakupan Layanan telekomunikasi pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 101.1% dan Target akhir RPJMD adalah 96,00% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 berada di angka 97.07% sehingga capaiannya sebesar 101.1%.

Tabel 3.24 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	96.00%	97.07%	101.1%	99	102%

Pada tabel diatas menunjukkan Cakupan Layanan telekomunikasi pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 102%. Hal ini didapat dari target nasional yang berada di angka 99% sedangkan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu berada di angka 97.07% sehingga capaian Nasional berada diangka 102%.

Tabel 3.25 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis			Pemerintah Daerah Penanggungjawab	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	Solusi yang dilakukan		
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	96.00%	97.07%	101.1%	Keberhasilan Indikator Kinerja Utama dilakukan percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi dan penyediaan alat menara telekomunikasi baik dari pemerintah daerah maupun dari bakti aksi	Belum maksimal dalam pemerataan Pembangunan Menara telekomunikasi dengan kondisi geografis di Mahakam Ulu	Dilakukan koordinasi dengan pihak Bakti untuk pemerataan Pembangunan jaringan telekomunikasi internet dan provider yang lain untuk daerah tidak mejangkau		



Tabel 3.26 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	96.00%	97.07%	101.1%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Berdasarkan dengan uraian sebelumnya, cakupan layanan telekomunikasi menunjang sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet. Adapun program yang menunjang cakupan layanan telekomunikasi adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

Tabel 3.27 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	1.26%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Cakupan layanan telekomunikasi efisien dalam penggunaan sumber daya, dengan tingkat efisiensi berada di angka 1.26%.



Sasaran 5 : Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni

Tabel 3.28 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	20,43	34.33	168%	22,43	41.33	184.28%

Sumber Data : Dinas PUPR

Fenomena meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni adalah cerminan dari upaya masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan standar kualitas hunian. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kesejahteraan material, namun juga kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan layak huni bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Di tengah upaya global untuk meningkatkan standar hidup, rumah layak huni menjadi pilar utama dalam memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi standar ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi keluarga. Rasio rumah layak huni mengacu pada perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, rumah layak huni memiliki kriteria yang harus dipenuhi, seperti :

1. Luas Bangunan : Setiap rumah layak huni harus memiliki luas minimal 7,2 meter persegi per orang;
2. Kualitas Fisik : Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, serta jenis atap, dinding, dan lantai yang memenuhi standar;



3. Fasilitas : Fasilitas di rumah layak huni meliputi luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC);
4. Kesehatan dan Keamanan : Rumah layak huni harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan dengan tabel di atas pada tahun 2024 realisasi kinerja berada di angka 41.33% dengan target kinerja berada di angka 22,43% sehingga capaian kinerja adalah 184.28% Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penambahan kinerja, pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka yang sama yakni 34.33% dengan target 20,43% sehingga capaiannya 168%.

Tabel 3.29 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	22,43	41.33	184.28%	22,43	184.28%

Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 184.28%. Hal ini dikarenakan target akhir RPJMD adalah sebesar 22,43% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 41.33% sehingga capaian kinerja berada diangka 184.28%.



**Tabel 3.30 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024
Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	22,43	41.33	184.28%	70	169%

Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 169% dengan target nasional yang berada di angka 70% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 41.33% sehingga capaiannya adalah sebesar 169%.

Tabel 3.31 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024		Analisis Kegagalan / Keberhasilan	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	22,43	41,33	184,28%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Besaran bantuan terlalu kecil sehingga bangunan kurang maksimal; 2. Akibat anggaran bantuan kecil, Masyarakat kurang berminat dialihkan ke dana desa. 	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kinerja.

Berdasarkan analisis, penyebab kegagalan capaian Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan besaran bantuan terlalu kecil sehingga bangunan kurang maksimal dan Akibat anggaran bantuan kecil, Masyarakat kurang berminat dialihkan ke dana desa.

Tabel 3.32 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	22,43	41.33	184.28%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Rasio Rumah Layak huni menunjang sasaran meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni dengan capaian sebesar 184.28%.

Tabel 3.33 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	86,61%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya rasio rumah layak huni. Pada tahun 2024 indikator kinerja sasaran Rasio Rumah layak Huni efisien dalam penggunaan sumber daya dengan mencapai angka 86,61%.



Sasaran 6 : Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara

**Tabel 3.34 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	61,28	95%	64,91%	67,50	96%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air yang diukur. IKA digunakan untuk menilai tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diijinkan. Semakin tinggi nilai IKA, semakin buruk kualitas air di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemantauan IKA penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 capaian kinerja Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air adalah sebesar 96% dengan rincian target berada di angka 67,50% dengan realisasi adalah sebesar 67,50% Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan , sedangkan pada tahun 2023 capaian berada di angka 95% dengan rincian target kinerja berada di angka 64,81 dengan realisasi berada di angka 61,28%.



Tabel 3.35 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,91	67,50	96%	71,88	94%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target capaian akhir RPJMD adalah sebesar 94% dengan rincian realisasi kinerja pada tahun 2024 berada di angka 67,50% dengan target akhir RPJMD berada di angka 71,88% sehingga capainnya sebesar 94%.

Tabel 3.36 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,91	67,50	96%	69,75	97%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 97% hal ini didapat dari rincian angka Indeks Kualitas Air Nasional berada di angka 69,75% sedangkan realisasi kinerja Mahakam Ulu berada di angka 67,50% sehingga capainnya berada di angka 97%.

Tabel 3.37 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaiian			
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,91	67,50	96%	Berhasil melalui target karena :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa himbauan yang dibarengi dengan Tingkat kesadaran bahwa penyebaran baru dengan aktivitas yang dapat membuat timbulan baru sampah bila dekat dengan keberadaan air tanah dapat mengganggu kondisi daya dukung air; 2. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah industry yang secara massif dan ketat agar tidak mengganggu kondisi saluran hidrologi alami dan pencemaran di DAS; 3. Adanya Upaya penghimbauan dan pengelolaan timbulan sampah Tingkat kampung; 4. Meningkatkannya kesadaran Masyarakat terkait manfaat air Sungai untuk memenuhi kebutuhan air secara mandiri untuk tetap menjaga kebersihan seputar sumber air. 	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat



Tabel 3.38 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,91	67.50	96%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air menunjang sasaran Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara pada tahun 2024 dengan angka capaian sebesar 96%.

Tabel 3.39 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	30,67%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka efisien berada di angka 30,67%.



Tabel 3.40 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01	94,43	102%	93,12	94,22	101,18%

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut semakin berbahaya pula udara tersebut bagi kesehatan makhluk hidup. IKU dihitung berdasarkan pengukuran beberapa parameter kualitas udara. IKU digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara di suatu wilayah. Dengan mengetahui nilai IKU, maka masyarakat dapat mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan. Seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi udara tinggi atau menggunakan masker.

Capaian Kinerja Indeks kualitas Udara pada tahun 2024 berada di angka 101,18% dengan rincian realisasi kinerja berada di angka 94,22% dengan target kinerja 93,12%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan capaian kinerja sebesar 99,63% dengan target kinerja sebesar 93,01 dengan realisasi 94,43 dengan capain kinerja 102%.

Tabel 3.41 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian



1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,12	94,22	101,18%	94,56	100%
----	--	--	-------	-------	---------	-------	------

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD capainnya sebesar 100% dengan rincian target akhir RPJMD adalah 94,56% dengan realisasi capain kinerja 2024 sebesar 94,22% sehingga capainnya adalah sebesar 100%.

**Tabel 3.42 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024
Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,12	94,22	101,18%	84,50	112%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 112% dengan target nasional berada di angka 84,50 dengan realisasi kinerja berada di angka 94,22% sehingga capaiannya berada di angka 112%.

Tabel 3.43 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,12%	94,22%	101,18%	<p>Berhasil melewati target namun mengalami penurunan pencapaian karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaruh adanya kegiatan budidaya Dimana pembakaran lahan yang tidak terkelola/tidak dilakukan pengawasan yang menimbulkan pencemaran udara; Tidak terkelolanya pembukaan lahan/wilayah hutan dengan cara membakar lahan menimbulkan karhutla/penimbangan hingga menimbulkan wilayah tersebut mempengaruhi beberapa karbon kondisi kualitas udara menjadi turun; Pembakaran sampah yang tidak terkelola; Pertumbuhan penduduk dan pemukiman yang mempengaruhi peningkatan karhutla; Kawasan RTH yang belum ditetapkan juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung udara yang berkualitas yang semakin menurun dan 	<p>Mempertahankan kondisi lingkungan yang mempengaruhi hasil pengukuran indeks kualitas udara dan Langkahlangkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembantuan kualitas udara dengan Pembangunan APBD dan meningkatkan pengawasan kesumber pencemaran; Meningkatkan peran serta Masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran udara dan pengawasan saat dilakukan kegiatan budi daya dengan pembukaan dengan pembakaran lahan; Pengurangan dan pencegahan pembakaran sampah (dipilah); Penetapan RTH perlu dilakukan agar memenuhi daya dukung dan daya tampung udara yang berkualitas; 	Dinas Lingkungan Hidup

		<p>menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK);</p> <p>6. Penyebaran baru aktifitas TPA yang berada diwilayah Kawasan tinggi kekeringan yang menyebabkan area TPA menimbulkan penyebaran bau tanpa ada teknologi atau alternatif untuk mengurangi bau dari sumber TPA tersebut;</p> <p>7. Belum banyak yang menyadari betapa pentingnya penghijauan terutama area sekitar TPA seperti menumbuhkan tanaman menyerap polusi udara yaitu angsona (<i>Pherocarpus indicus</i>), akasia daun lebar (<i>Acacia Mangium</i>), Oleander (<i>Nerium Oleander</i>), Boegenvil (<i>Bougenvilla Sp</i>), The-The an pangkas (<i>Acalypha Sp</i>).</p>	<p>5. Mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan penyebaran bau dari aktivitas TPA yang berada diwilayah Kawasan tinggi kekeringan yang menyebabkan area TPA menimbulkan penyebaran bau;</p> <p>6. Penyadaran pada Masyarakat dan menggerakkan aksi penghijauan terutama area sekitar TPA seperti menumbuhkan tanaman, penyerap polusi udara;</p> <p>7. Mengupayakan teknologi atau alternatif untuk mengurangi bau dari sumber TPA tersebut;</p> <p>8. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara dengan diharapkan untuk tahun depan dapat melakukan pengisian data pada aplikasi indeks respon dengan lengkap.</p>
--	--	---	---



Tabel 3.44 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,12	94,22	101,18%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Hasil pengukuran indeks Kualitas Udara menunjang sasaran menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara. Adapun program yang menunjang adalah Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3).

Tabel 3.45 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	30,67 %	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi berada di angka 30,67%.

Tabel 3.46 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100	100	100	100%



Indeks Kualitas Lahan (*IKL*) adalah 100 nilai 100% yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah. IKL terdiri dari dua komponen utama :

1. **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)** : Mengukur kondisi tutupan lahan, termasuk hutan dan vegetasi non-hutan. IKTL memberikan informasi tentang keberlanjutan ekosistem dan fungsi lahan.
2. **Indeks Kualitas Ekosistem Gambut** : Khusus untuk lahan gambut, menggambarkan kondisi ekosistem gambut, termasuk tingkat degradasi dan kerentanannya terhadap perubahan iklim.

IKL digunakan untuk memahami dan mengelola kualitas lahan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perlindungan atau restorasi. Dengan memantau IKL, kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi lahan dan ekosistem.

Berdasarkan dengan tabel di atas, pada tahun 2024 capaian kinerja berada di angka 100% dengan realisasi dan target kinerja berada di angka 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja ini cenderung konsisten dan tahun 2023 dengan capaian kinerja berada di angka 100% dengan target dan realisasi berada di angka 100.

Tabel 3.47 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%	100	100%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD capainnya adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% dengan target akhir RPJMD adalah 100 dan realisasi kinerja pada tahun 2024 sudah mencapai angka 100%.



**Tabel 3.48 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024
Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024		Capaian	Standar Nasional	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%	69,75	143%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 143% dengan rincian target berada di angka

69,75 dengan realisasi pada tahun 2024 adalah 100% sehingga capainnya sebesar 143%.

Tabel 3.49 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024		Analisis		Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian	Keberhasilan / Kegagalan	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%	Meskipun pertumbuhan penduduk terus tumbuh akan tetapi tingkat kepadatan penduduk belum mempengaruhi secara signifikan terhadap perubahan luas Kawasan lahan.	<p>Mendorong penetapan RTH agar memberikan dukungan pelestarian keragaman hayati; Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan ahli fisi lahan;</p> <p>Melakukan pengisian indeks respon.</p>



Tabel 3.50 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan menunjang sasaran menurunnya tingkat pencemaran tanah, air, dan udara. Adapun program yang mendukung Indeks Kualitas Lahan adalah Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 3.51 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	30,67 %	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya indeks kualitas lahan. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka efisiensi 30,67 %.

Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan



Tabel 3.52 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,65	73,56	97%	75,80	Belum Keluar	na

Sumber Data : DKPP

Lapangan usaha pertanian memiliki kontribusi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari memenuhi kebutuhan pangan hingga mendukung perekonomian nasional. Sebagai salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi suatu negara, pertanian memiliki peran yang tidak bisa diremehkan dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, kontribusi lapangan usaha untuk sektor pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan Mahakam Ulu tidak dapat dilakukan perbandingan karena realisasi capaian masih dalam proses/ perhitungan.

Tabel 3.53 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,80	Belum Keluar	na	73,93	na

Pada tahun 2024, kontribusi lapangan usaha untuk sektor pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan Mahakam Ulu tidak dapat dilakukan



perbandingan dengan capaian akhir RPJMD karena Realisasi capaian 2024 masih dalam proses/ perhitungan.

Tabel 3.54 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,80	Belum Keluar	na	90	na

Pada tahun 2024, kontribusi lapangan usaha untuk sektor pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan Mahakam Ulu tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian nasional karena Realisasi capaian 2024 masih dalam proses/ perhitungan.

Tabel 3.55 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024		Analisis		Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah	Penaggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian	Keberhasilan / Kegagalan			
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,80	Belum Keluar na				DKPP	



Tabel 3.56 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,80	Belum Keluar	na	na

Pada tahun 2024, kontribusi lapangan usaha untuk sektor pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan Mahakam Ulu tidak dapat ditentukan menunjang atau tidak indicator kinerja sasaran Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian karena Realisasi capaian 2024 masih dalam proses/ perhitungan.

Tabel 3.57 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	47%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian. Pada tahun 2024 indikator kinerja sasaran Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian efisien dalam penggunaan sumber daya dengan mencapai angka 47%.

Sasaran 8 : Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam

Tabel 3.58 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



1.	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21	26,44	130%	21,19	34,66	164%
----	---	--	-------	-------	------	-------	-------	------

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA

Lapangan usaha perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat vital dalam ekonomi suatu negara. Sebagai sektor yang menghubungkan produsen dengan konsumen, serta menyediakan berbagai layanan penting bagi masyarakat, kontribusi dari sektor ini tidak dapat diabaikan. lapangan usaha perdagangan dan jasa merupakan tulang punggung ekonomi yang berperan penting dalam menyediakan layanan, memperkaya pilihan konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beragamnya kontribusinya yang diberikan oleh sektor ini memastikan berlangsungnya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat luas serta perkembangan negara secara keseluruhan.

Pada tahun 2024 realisasi kinerja berada di angka 34,66% dengan target 21,19% sehingga capaian kinerjanya berada di angka 164%. Capaian ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 target kinerja berada di angka 20,21% dan realisasi kinerja berada di angka 26,44% sehingga capaian kinerja berada di angka 130%.

Tabel 3.59 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	21,19	34,66	164%	19,26	180%

Capaian kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah 180%. Hal ini didapat



dari realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada di angka 34.66% dengan target akhir RPJMD sebesar 19,26% sehingga capainnya berada diangka 180%.

Tabel 3.60 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	21,19	34,66	164%	19,89	174%

Pada tabel diatas Capaian kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 174%. Hal ini didapat dari realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada di angka 34,66% dengan target nasional sebesar 19,89% sehingga capainnya berada diangka 174%.

Tabel 3.61 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	21,19	34,66	164%	Pengawasan akan Harga dan Barang Bagi Pelaku Ekonomi Mikro Kecil Tidak dapat terlaksana/dengan membuat edaran dapat Mengurangi kendala dalam Perencanaan Kegiatan Ekonomi Mikro Kecil yang tidak maksimal	Dengan membuat edaran dapat Mengurangi kendala dalam Perencanaan Kegiatan Ekonomi Mikro Kecil yang tidak maksimal	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah



Tabel 3.62 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	21,19	34,66	164%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa menunjang sasaran Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam. Adapun program yang menunjang adalah:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Pengembangan UMKM
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- d. Program Pemasaran Pariwisata
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.



Tabel 3.63 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	35%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Sasaran kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka 35%.

Sasaran 9 : Meningkatnya Investasi Daerah

Tabel 3.64 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam miliar)	3.075,94	531	17%	3.168.217.000.000	784.140.270.000 .	25%

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam miliar adalah indikator yang penting dalam menggambarkan dinamika perekonomian suatu negara. Investasi dalam skala besar ini mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, pertanian, infrastruktur, hingga jasa. jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam miliar adalah cermin dari kegiatan ekonomi yang berjalan di dalam suatu negara. Investasi dalam skala besar ini memiliki dampak yang luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sektor, peningkatan



infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi perlu terus mendorong investasi yang berkualitas untuk memperkuat fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Capaian kinerja pada tahun 2024 berada di angka 25% dengan rincian target kinerja berada di angka 3.168.217.000.000 sedangkan realisasi kinerja berada di angka 784.140.270.000. Capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 di mana pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 17% dengan realisasi kinerja berada di angka 531 Miliar dengan target kinerja berada di angka 3.075,94 Miliar.

Tabel 3.65 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.168.217.000.000	784.140.270.000	25%	360	218%

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 218%. Angka ini didapat dari realisasi pada tahun 2024 yang berada di angka 784.140.270.000 dengan target akhir RPJMD adalah 360 Miliar. Sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 3.66 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian



1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.168.217. 000.000	784.140. 270.000	25%	1.650.000. 000.000.000	0%
----	-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----	---------------------------	----

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Target nasional yang berada di angka Rp. 1650.000.000.000.000 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka Rp. 784.140.270.000.

Tabel 3.67 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Pemerintah Daerah Penanggungjawab	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDNI/PMA) (dalam milyar)	3.168.217.000.000	784.140.270.000	25%	Realisasi target rendah karena ada kesalahan dalam Penentuan target Program kegiatan di Dokumen Renstra	Mencermati Isian Target Tahunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Dokumen Renstra	DPMPTSP



Tabel 3.68 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.168.217.000.000	784.140.270.000	25 %	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) menunjang sasaran Meningkatnya Investasi Daerah. Adapun program yang menunjang Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3.69 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	80%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya Investasi Berskala Nasional. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) Efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi berada di angka 80%.



Sasaran 10 : Berkurangnya Angka Kemiskinan

**Tabel 3.70 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,90	11,38	115%	9,83	10,75	109%

Angka kemiskinan di Indonesia dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk tingkat kemiskinan, yang mengacu pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan angka yang menggambarkan jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan akses layanan kesehatan.

Pada tahun 2024 realisasi kinerja berada di angka 10,75% dengan target 9,83% sehingga capaian kinerjanya berada di angka 109%. Capaian ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 target kinerja berada di angka 9,90% dan realisasi kinerja berada di angka 11,38% sehingga capaian kinerja berada di angka 115%.

Tabel 3.71 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,83	10,75	109%	10,94	98%



Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah 98%. Hal ini didapat dari realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada di angka 10,75% dengan target RPJMD sebesar 10,94% sehingga capainnya berada di angka 98%.

Tabel 3.72 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,83	10,75	109%	7,5	143%

Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 143%. Hal ini didapat dari realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada di angka 10,75% dengan target nasional sebesar 7,5% sehingga capainnya berada di angka 143%.

Tabel 3.73 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024				Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penaggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan			
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,83	10,75	109%	Adanya realisasi bantuan bagi PMKS dan bantuan ketahanan keluarga	Dari bantuan yang ada Dinas Sosial tidak bisa menargetkan jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, karena belum adanya data yang valid terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu, dan minimnya data terkait kategori penilaian yang pasti mengingat terdapat beberapa OPD yang menjadi sasaran dalam pencapaian indicator Jumlah Angka Kemiskinan	Melakukan kerja sama dengan pihak BPS dengan menggunakan data BPS terkait presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu	Dinas Sosial



Tabel 3.74 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,83	10,75	109%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Angka Kemiskinan menunjang sasaran berkurangnya angka kemiskinan. Adapun program yang menunjang adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Tabel 3.75 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	59%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator angka kemiskinan efisien dalam penggunaan sumber daya yang berada diangka 59%.

Sasaran 11 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 3.76 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	2,09	83%	na	na	na
<i>Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>								

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dapat dirumuskan sebagai berikut: TPT = (Pencari Kerja / Angkatan Kerja) x 100%. Pengangguran terbuka berbeda dengan pengangguran tertutup, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengacu pada persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Orang yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka adalah :

1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran terbuka apabila ia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meski sudah memiliki pekerjaan.

Berdasarkan dengan tabel tahun 2024 di atas, Indikator Sasaran capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dilaksanakan pada tahun 2024 maka dengan demikian tidak bisa dibuat perbandingan.

Tabel 3.77 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian



1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na	na	3,01	na
----	---	----------------------------------	----	----	----	------	----

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan dengan tabel tahun 2024 di atas, Indikator Sasaran capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dilaksanakan pada tahun 2024 maka dengan demikian tidak bisa dibuat perbandingan.

Tabel 3.78 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na	na	5,45%	na

Berdasarkan dengan tabel tahun 2024 di atas, Indikator Sasaran capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dilaksanakan pada tahun 2024 maka dengan demikian tidak bisa dibuat perbandingan.

**Tabel 3.79 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan
serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis		Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan		
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na	na				Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah



Tabel 3.80 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na	na	na

Tabel di atas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjang menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun program yang mendukung Tingkat Pengangguran Terbuka adalah :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan dengan tabel tahun 2024 di atas, Indikator Sasaran capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dilaksanakan pada tahun 2024, dengan demikian tidak dapat menentukan menunjang/ tidak sasaran menurunnya Tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.81 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na

Berdasarkan dengan tabel tahun 2024 di atas, Indikator Sasaran capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dilaksanakan pada tahun 2024 maka dengan demikian tidak menentukan Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran menurunnya Tingkat pengangguran terbuka.



Sasaran 12 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.82 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,66	8,49	98%	100	99,49	99,49%

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Rata-rata lama sekolah menggambarkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Ini adalah indikator penting untuk memahami tingkat pendidikan dan akses pendidikan di suatu negara. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik kesempatan pendidikan bagi penduduk.

Pada tahun 2024 capaian kinerja berada di angka 99,49% angka ini didapat dari target kinerja yang berada di angka 100% sedangkan realisasi kinerja berada di angka 99,49% Angka ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka 8,49 sedangkan target kinerja berada di angka 8,66 sehingga capaian pada tahun 2023 berada di angka 98%.

Tabel 3.83 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100	99,49	99,49%	9,00	11%



Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 11%. Angka ini didapat dari target akhir RPJMD yang berada di angka 9,00% sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 berada di angka 99,49% sehingga capaian kinerja berada di angka 11%.

Tabel 3.84 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100%	99,49%	99,49%	8,77	11%

Capaian Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Capaian Nasional adalah berada di angka 11%. Angka ini didapat dari realisasi standar nasional yang berada di angka 8,77, apabila dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 99,49% dengan target 100% maka capaian kinerjanya sebesar 11%.

Tabel 3.85 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024		Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100	99,49	99,49%	Indeks SPM Telah mencapai 99,49% namun masih banyak terdapat indicator yang mengalami kendala penutupan mutu terutama pada satuan Pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan oleh tidak berjalan sebagaimana mestinya program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sehingga target dan capaian tidak dapat terisi dan tercapai.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Tabel 3.86 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100%	99,49%	99,49%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan angka rata-rata lama sekolah menunjang sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Adapun program yang menunjang angka rata-rata lama sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

Tabel 3.87 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	51%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Angka rata-rata lama sekolah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka 51%.

**Tabel 3.88 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63	97%	100	80	80%



Harapan Lama Sekolah (HLS) mengacu pada lamanya pendidikan formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Ini adalah indikator penting untuk memahami tingkat pendidikan dan akses pendidikan di suatu negara.

Pada tahun 2024 realisasi kinerja berada di angka 80% dengan target 100% sehingga capaian kinerja berada di angka 80%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja berada di 97% dengan rincian realisasi kinerja di angka 12,63% dengan target kinerja 12,97%.

Tabel 3.89 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	100	80	80%	12,80	625%

Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah berada di angka 625%. Angka ini didapat dari realisasi standar nasional yang berada di angka 12,80, apabila dibandingkan dengan realisasi

Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 80% maka capaian kinerjanya sebesar 625%.

Tabel 3.90 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	100	80	80%	13,21	606%

Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Capaian standar Nasional adalah berada di angka 606%. Angka ini didapat dari realisasi standar nasional yang berada di angka 13,21, apabila dibandingkan



dengan realisasi Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 80% maka capaian kinerjanya sebesar 606%.

**Tabel 3.91 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan
serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	100	80	80%	Indeks SPM Telah mencapai 99,49% namun masih banyak terdapat indicator yang mengalami kendala dalam penutupan mutu terutama pada satuan Pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan oleh tidak berjalan sebagaimana mestinya program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sehingga target dan capaian tidak dapat terisi dan tercapai.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	



Tabel 3.92 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	100	80	80%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Harapan Lama Sekolah menunjang sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Adapun program yang menunjang harapan lama sekolah adalah :

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tabel 3.93 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	51%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Harapan Lama Sekolah efisien dalam penggunaan sumber daya, efisiensi penggunaan sumber daya berada di angka 51%.



Sasaran 13 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.94 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,40	73,44	102%	72,50	72,65	100%

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengacu pada rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perpanjangan umur harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup suatu populasi. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024 capaian kinerja UHH berada di angka 100%. Angka ini didapat dari target kinerja yang berada di angka 72,50% sedangkan realisasi kinerja berada di angka 72,65%. sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka 73,44 dengan target kinerja berada di angka 72,40 sehingga capaian pada tahun 2023 berada di angka 102%.

Tabel 3.95 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,50	72,65	100%	72,64	100%

Capaian Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Angka ini didapat dari target akhir RPJMD yang berada di angka 72,64%, apabila dibandingkan dengan realisasi



Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 72,65% maka capaian kinerjanya sebesar 100%.

Tabel 3.96 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,50	72,65	100%	72,39	100%

Capaian Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir standar nasional adalah sebesar 100%. Angka ini didapat dari target standar nasional yang berada di angka 72,39%, apabila dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 72,65% maka capaian kinerjanya sebesar 100%.

Tabel 3.97 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Keberhasilan	Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,50	72,65	100%	<p>1. Faktor teknologi Kesehatan Tersedianya teknologi faksin dan farmasi yang mampu memproduksi massal dan lebih murah vaksin dan obat – obatan. Dan produk itu terbukti efektif mencegah dan mengobati penyakit menular, misanya vaksin polio, campak, penyakit gondok, rubella, difteri, tetanus dan lainnya. Tersedianya obat malaria yang mampu membersihkan parasit malaria di pembuluh darah;</p> <p>2. Intervensi Kesehatan ibu dan anak, layanan Kesehatan dan Pembangunan ekonomi;</p> <p>a. Perbaikan dalam layanan Kesehatan ibu dan anak, meliputi persalinan yang</p>	<p>1. Masalah besar yang sedang dihadapi oleh penduduk yakni beberapa penyakit menular, seperti tuberkulosis masih tinggi dan penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, stroke juga meningkat;</p> <p>2. Letak geografis Kabupaten Mahakam ulu merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai luas wilayah 15.315 km2 atau kurang lebih</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM Kesehatan diwilayah Kabupaten Mahakam Ulu;</p> <p>2. Perlu kerja lebh keras lagi secepatnya menyelesaikan masalah penyakit infeksi, Kesehatan ibu, dan anak serta nutrisi. Selain itu memang tidak dapat dipungkiri, masalah Kesehatan akibat penyakit tidak menular menjadi masalah Kesehatan utama Indonesia. Jika masalah tidak diatasi, hal ini menurunkan kualitas kehidupan penduduk : usia hidup harap naik tapi</p>	Dinas Kesehatan

		<p>aman, perbaikan nutrisi, imunisasi dan perbaikan sanitasi rumah dan Kesehatan lingkungan;</p> <p>b. Program keluarga berencana untuk berkontribusi menurunkan angka kematian ibu.</p> <p>3. Pembangunan yang relative stabil Berkat pendapatan pemerintah yang meningkat, pemerintah menambah tenaga Kesehatan dan fasilitas Kesehatan. Seperti rumah sakit, keberadaan puskesmas yang semakin banyak dan dekat dengan Masyarakat. Setiap kecamatan setidaknya punya satu puskesmas dan setiap kampung mempunyai satu puskesmas pembantu. Tenaga Kesehatan yang tadinya didominasi oleh kelompok elit pada masa perang kemerdekaan semakin bertambah dengan dibukanya fakultas kedokteran di setiap provinsi.</p>	<p>7,25%. Dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Letak kecamatan yang terpisah-pisah dan jarak tempuh yang jauh mempersulit proses rujukan jika ada kasus gawat darurat yang memerlukan tenaga profesional, atau jarak tempuh yang lama menuju ke pusat pelayanan yang memadai</p>	<p>didaerah berkepanjangan.</p> <p>3. Untuk memperlancar terjadinya penyakit atau gangguan Kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa indicator yang menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi (pembuangan air limbah, tempat sampah, dan kepemilikan jamban), tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengelolahan limbah di sarana pelayanan Kesehatan. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan</p>
--	--	--	--	--

4. Dibukanya akses transportasi, informasi, ekonomi, dan mobilitas penduduk. Lingkungan yang tadinya rawan dengan nyamuk malaria menjadi tergusur dan digantikan dengan pemukiman keterlambatan penanganan kasus darurat dapat diminimalkan dengan adanya tenaga Kesehatan di desa-desa yang jauh dari puskesmas sekaligus dengan terdirinya angkutan darurat,	merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah;	4. Didukung oleh perilaku Masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat.	minum dan masak	



Tabel 3.98 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,50	72,65	100%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Umur Harapan Hidup menunjang sasaran meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.99 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	77%	N/A

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Umur Harapan Hidup efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka 77%.

Sasaran 14 : Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Tabel 3.100 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42	110%	B (78)	B (80)	103%

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat puas dengan pelayanan yang mereka terima.

Pada dasarnya, IKM melibatkan survei yang mengumpulkan pendapat masyarakat tentang berbagai aspek pelayanan. Pada tahun 2023, target dari IKM sendiri yaitu 70,51 dan direalisasikan sebanyak 70,42 sehingga capaiannya berada diangka 110%. Sedangkan pada tahun 2024, Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar B (80) dengan target B (78) sehingga Capaiannya berada diangka 103%.

Tabel 3.101 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78)	B (80)	103%	98,54	79%

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 79%. Hal ini karena target akhir RPJMD sebesar 98,54 sedangkan Realisasi pada tahun 2024 sebesar 80 Sehingga capaian dari target akhir RPJMD adalah sebesar 79%.

Tabel 3.102 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78)	B (80)	103%	83,25	93%



Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 93%. Hal ini karena target standar nasional sebesar 83,25 sedangkan Realisasi pada tahun 2024 sebesar 80% Sehingga capaian dari target akhir RPJMD adalah sebesar 93%.

Tabel 3.103 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78)	B (80)	103%	<p>1. Melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan SKM masing - masing Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.</p> <p>2. Melakukan evaluasi/reviu SKM Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu - Memberikan pelatihan secara internal untuk surveyor Pemerintah Daerah tentang tata cara pengambilan data dari responden.</p> <p>3. Memotivasi surveyor untuk mendapatkan data sebanyak banyaknya dari responden yang tepat</p> <p>4. Bekerjasama dengan instansi terkait pelayanan publik untuk berkolaborasi dengan bagian Organisasi dalam pengumpulan data.</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

			5. Memberikan nasukan dan saran kepada instansi terkait pelayanan public tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan atau dilengkapi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik terhadap masyarakat



Tabel 3.104 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78)	B (80)	103%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Dari data di atas, ditunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat menunjang Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas dengan capaian angka sebesar 103%.

Tabel 3.105 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	66%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator Kinerja Sasaran yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 66%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat efisien dalam penggunaan sumber dayanya.

Sasaran 15 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah Kinerja

Tabel 3.106 Perbandingan Antara Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada empat kriteria :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan** : Menilai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)** : Memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah diungkapkan dengan memadai dalam laporan keuangan;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan** : Menilai apakah entitas yang diperiksa mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan;
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern** : Mengukur efektivitas sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan beberapa jenis opini :

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;



2. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan'
3. **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** : Menyatakan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas laporan karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini.
4. **Tidak Wajar (TW)** : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tahun 2024, capaian realisasi Opini BPK (WTP) berada di angka WTP dengan target WTP sehingga capaiannya sebesar 100%. sedangkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 berada diangka WTP dengan target WTP sehingga capainnya sebesar 100%.

**Tabel 3.107 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024
Dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Opini BPK (WTP) pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian akhir RPJMD adalah 100%. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada WTP dan target akhir RPJMD adalah WTP sehingga capaiannya berada diangka 100%.



Tabel 3.108 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Opini BPK (WTP) pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan standar nasional adalah 100%. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang berada di angka WTP dan target standar nasional yaitu WTP sehingga capaiannya berada di angka 100%.

Tabel 3.109 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis		Pemerintah Daerah penanggung jawab
			Target	Realisasi	Capaian	Keberhasilan Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diperlukan upaya yang komprehensif, berkelanjutan dan Persiapan Dokumen yang Lengkap dan Akurat Seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.Berikut adalah beberapa Upaya yang dilakukan BPKAD:	<p>1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan :</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) : Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP yang berlaku, Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala mengenai SAP kepada seluruh pihak terkait, Pengendalian Internal yang Efektif, Melakukan rekonsiliasi data secara rutin antara berbagai unit kerja untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang, Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh public, Meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.</p>	BPKAD

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada aparatur pengelola keuangan mengenai akuntansi, audit, dan peraturan perundangundangan terkait, Adanya panduan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar sumber daya manusia/aparatur memahami tentang akuntansi dan bagaimana cara pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP, Merekrut dan mempertahankan aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK:
Menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan efektif, Menyusun rencana aksi yang jelas untuk mengatasi temuan-temuan BPK, Mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan untuk melaksanakan rekomendasi BPK.
4. Penggunaan Teknologi Informasi
Menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dan audit.
5. Peran Masyarakat
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan Daerah, Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.



**Tabel 3.110 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang menyatakan bahwa sasaran meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah menunjang kinerja tujuan. Opini BPK menunjang sasaran meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program yang menunjang adalah :

1. Program Perencanaan, Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
7. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 3.111 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	39%	Efisien



Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator Opini BPK menunjukkan efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka 39%.

Sasaran 16 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung Yang Baik

Tabel 3.112 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	17	212,50%	8	16	200%

1. Desa Mandiri : Desa Mandiri, juga dikenal sebagai Desa Sembada, adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat sebesar-besarnya. Desa Mandiri memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan;
2. Desa Maju : Desa Maju, atau Desa Pra Sembada, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini mampu mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan;
3. Desa Berkembang : Desa Berkembang, atau Desa Madya, adalah desa yang potensial menjadi desa maju. Meskipun memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, desain ini belum mengelola secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan;
4. Desa Tertinggal : Desa Tertinggal, atau Desa Pra-Madya, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau



kurang mengelolanya dengan baik. Akibatnya, desa ini mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Semakin banyak desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri, semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Pada tahun 2024, realisasi jumlah desa maju sebanyak 16 desa dengan target 8 desa sehingga capaiannya sebesar 200%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi tahun 2023 jumlah desa maju sebanyak 17 desa dengan target 8 desa sehingga capainnya sebesar 213%.

Tabel 3.113 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	16	200%	12	133%

Jumlah Desa Maju pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD termasuk ke dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator kinerja sasaran jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Pada target akhir indikator jumlah desa maju memiliki target 12 desa dengan realisasi 16 desa maka capaiannya sebesar 133%.



Tabel 3.114 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	16	200%	23.030	0%

Jumlah Desa Maju di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal, maka realisasinya adalah sebagai berikut. Dari indikator jumlah desa maju memiliki target dari standar nasional sebesar 23.063, dengan realisasinya sebesar 16, maka capaiannya sebesar 0%.

Tabel 3.115 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis	Solusi yang dilakukan	Pemerintah Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	16	200%	<p>1. Melakukan Sinergitas Program, kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk lokasi Target IDM baik Desa Maju maupun desa tertinggal;</p> <p>2. Bersinergi Program kegiatan antara OPD terkait dalam upaya pencapaian target RPJMD melalui terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sesuai score agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran;</p> <p>Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian IDM kepada Pendamping Desa.</p>	DPMK	



Tabel 3.116 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/ Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	16	200%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal.

Kedua indikator menunjang pencapaian pernyataan kinerja tujuan karena capaiannya berada pada angka 200% dengan realisasi 16 desa dan target 8 desa. Jumlah desa maju menunjang sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik, adapun program yang menunjang indikator jumlah desa maju adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Tabel 3.117 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	30,83%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator kinerja sasaran jumlah desa maju, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan angka 30,83% .



Tabel 3.118 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	7	8	114%	31	0	0%

1. Desa Mandiri : Desa Mandiri, juga dikenal sebagai Desa Sembada, adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat sebesar-besarnya. Desa Mandiri memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan;
2. Desa Maju : Desa Maju, atau Desa Pra Sembada, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini mampu mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan;
3. Desa Berkembang : Desa Berkembang, atau Desa Madya, adalah desa yang potensial menjadi desa maju. Meskipun memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, desa ini belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan;
4. Desa Tertinggal : Desa Tertinggal, atau Desa Pra-Madya, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dengan baik. Akibatnya, desa ini mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Semakin sedikit desa yang masuk dalam kategori tertinggal, semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Pada tahun 2024, realisasi jumlah desa tertinggal sebanyak 0 desa dengan



target sebesar 31 desa sehingga capaian kinerja berada di angka 0%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja adalah sebesar 114% dengan realisasi capaian 8 desa dan target 7 desa.

Tabel 3.119 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	31	0	0%	9	0%

Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD termasuk ke dalam sasaran dari terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang baik dengan indikator kinerja sasaran jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Pada target akhir indikator jumlah desa tertinggal memiliki target 9 desa dengan realisasi 0 sehingga capaian akhirnya berada di angka 0%.

Tabel 3.120 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	31	0	0%	4.982	0%

Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan Standar Nasional yang dimuat dalam sasaran terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Dari indikator jumlah desa maju memiliki target dari standar



nasional sebesar 4.982, dengan realisasi capaian 2024 sebanyak 05, sehingga capaiannya sebanyak 0%.

**Tabel 3.121 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan
serta Solusi yang Dilakukan Ke Depan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Analisis		Pemerintah Daerah Penaggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	31	0	0%	1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk lokasi Target IDM baik Desa Maju maupun desa tertinggal;	<p>2. Bersinergi Program kegiatan antara OPD terkait dalam upaya pencapaian target RPJMD melalui ter mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sesuai score agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran;</p> <p>Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian IDM kepada Pendamping Desa.</p>	DPMK



Tabel 3.122 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	31	0	0%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Kedua indikator menunjang pencapaian pernyataan kinerja tujuan karena capaiannya berada di angka 0% untuk indikator jumlah desa tertinggal. Adapun program yang menunjang adalah :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program yang diampu oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Kecamatan Apari, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Pahangai.

Tabel 3.123 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	30,83%	Efisien



Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator kinerja sasaran jumlah desa tertinggal, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka efisiensi berada di angka 30,83.

Tabel 3.124 Realisasi Anggaran Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Pemerintah Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2024	
				Target	Realisasi
Meningkatnya koneksi vitas antar wilayah kecamatan		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PKP	1.131.225.922.212	874.988.820
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri airan bersih		Persentase capaian akses air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PKP	53.085.675.736	24.961.424.604
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik		Persentase KK yang dialiri Listrik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PKP	13.968.076.000	12.059.777.622
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet		Cakupan layanan telekomunikasi	Dinas Kominfostandi	20.633.009.500,00	16.403.644.913,00
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni		Rasio rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PKP	3.180.081.849	2.754.181.849
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara		Hasil pengukuran indeks kualitas air			
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	17.637.726.925	16.189.863.191
		Hasil pengukuran indeks kualitas Lahan			

Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Pemerintah Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2024	
				Target	Realisasi
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.214.044.031,00	15.644.080.177,00	
Meningkatnya peran sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (dalam arti luas) (%)	Bagian Ekonomi dan SDA Setdakab	1.512.722.300	524.334.759	
Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDNI/PMA) (dalam miliar)	DPMSTP	11.454.160.383	9.162.175.266	
Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.664.952.615	5.713.229.239	
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab	na	na	
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	165.869.901.663	84.701.776.071	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Harapan lama sekolah	Umur harapan hidup (tahun)	Dinas Kesehatan dan P2KB	111.298.812.558	85.799.650.305

Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Pemerintah Daerah Penangungjawab	Anggaran Tahun 2024	
				Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas		Indeks kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	90.000.000	136.779.484
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	BPKAD	50.553.430.914,42	19.932.737.687,00	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang baik	Jumlah desa Maju Jumlah desa Tertinggal	DPMK	234.547.276,500	216.905.726,940	

Tabel 3.125 Tabel Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran *Capaian Kinerja – Realisasi anggaran
Meningkatnya koneksi antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5	2,29	58%	1.131.225.922.212	874.988.820	6.561.110.348,83
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	28,00	48,6	173,6%	53.085.675.736	24.961.424.604	5.686.121.528,83
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik	96,01	10,90	11,35%	13.968.076.000	12.059.777.622	15.853.766,26
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Cakupan Layanan Telekomunikasi	96,00	97,07	101,1%	20.633.009.500,00	16.403.644.913,00	208.599.726,05
	Rasio rumah layak huni	22,43	41,33	184,28%	3.180.081.849	2.754.181.849	58.602.548,31
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	64,91	67,50	96%			2.695.579.300,69

Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93,12	94,22	101%	17.637.726,925	16.189.863,191	523.840.489,67	15.666.022.701,33
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%				
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	73,93	Belum Ketuar	na	33.214.044.031,00	15.644.080.177,00	na	na
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	21,19	34,66	164%	1.512.722.300	524.334.759	24.808.645,72	49.526.113,28
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Miliar)*	3.168.217.000,000	784.140.270.000	25%	11.454.160.383	9.162.175.266	28.635.400,96	9.133.539.865,04
Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	9,83	10,75	109%	9.664.952.615	5.713.229.239	105.347.983,50	5.607.881.225,50
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	na	na	na	na	na	na	na

Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	100	99,49	99,49%			
Harapan Lama Sekolah	100	80	80%		165.869.901.663	84.701.776.071	2.977.198864,95
Meningkatnya derajat Kese Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas hatian Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,50	72,65	100	111.298.812,558	85.799.650,305	1.112.988.125,58
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78)	B (80)	103%	90.000.000	136.779.484	92.307.692,31
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	50.553.430.914,42	19.932.737.687,00	505.534.309,14
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	8	16	200%			19.427.203.278,00
	Jumlah Desa Tertinggal	31	0	0%	234.547.276,500	216.905.726,940	4.690.945.530,00
							212.214.781.410,00



C. PRESTASI KABUPATEN MAHAKAM ULU



1. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperoleh Panji Keberhasilan Terbaik I Bidang Kehutanan Pada Upacara Peringatan HUT Provinsi Kalimantan Timur Ke-67.



2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima mendapatkan Juara I Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Bagian Hukum Kab/Kota se-Kalimantan Timur periode Tahun 2023



3. Kabupaten Mahakam Ulu yang salah satu dari 99 Kabupaten/Kota di Indonesia menerima Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam momen peringatan Hari Neglected Tropical Diseases (NTSDs) Sedunia.



Sebagai Pemda Dengan Peningkatan Nilai MCP Tertinggi Tahun 2023
Kategori Pemerintah Kabupaten Yang Diserahkan Direktur Koorsup Wilayah IV
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Elly Kusumaatuti
di Gedung KPK Jakarta (2/5/2024).

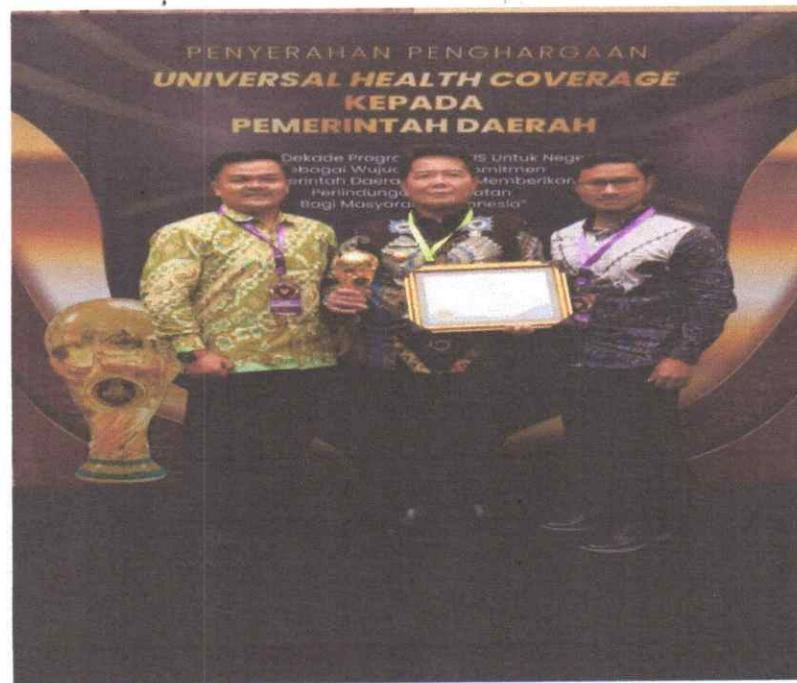
4. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan Sertifikat Penghargaan sebagai Pemda dengan peningkatan Nilai MCP tertinggi tahun 2023 Kategori Pemerintah Kabupaten.



5. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali meraih Opini WTP Ke-5 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kaltim



6. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Entitas Pemeriksaan dengan Progres penyelesaian TLRHP BPK semester I Tahun 2024 tertinggi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;



6. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
7. Bupati Mahakam Ulu menerima Penghargaan Widya Wiyata Dharma Samya dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) atas kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.



8. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima penghargaan sebagai Peringkat 10 Penghargaan Paritrana yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Kaltim pada malam Paritrana dan Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digelar oleh Disakertrans Provinsi Kaltim.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas Bupati Mahakam Ulu terkait dengan pelaksanaan kinerja selama tahun 2024, yang digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan di tahun mendatang. Laporan ini memaparkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Evaluasi ini mencakup analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Sasaran Strategis, yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi pada tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi RPJMD, yaitu "Membangun Mahulu Untuk Semua: Sejahtera, Berkeadilan ". Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi, yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local;
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.



Pencapaian visi dan misi Bupati Mahakam Ulu dikelola secara terstruktur melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menyusun Perjanjian Kinerja Bupati Mahakam Ulu untuk tahun tersebut. Secara keseluruhan, hasil Indikator Kinerja Tujuan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut Berdasarkan 20 Indikator Sasaran maka dapat diperoleh bahwa 80% sangat tinggi, 5% tinggi, 10% sangat rendah, dan 5% tidak diketahui.

B. UPAYA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran di atas, maka upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya komitmen bersama untuk penguatan terhadap tata kelola pemerintahan, pentingnya tata kelola pemerintahan yang aktif, efisien, dan berdampak kepada masyarakat memberikan pengaruh signifikan kepada etos kerja Aparatur Sipil Negara. Penguatan komitmen bersama seluruh Organisasi Pemerintah Daerah dalam berkinerja dapat mendorong akselerasi penguatan tata kelola Pemerintahan Kab Mahakam Ulu;
2. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2023 lebih diarahkan ke infrastruktur (usulan pokir dan aspirasi masyarakat) yang didanai oleh DAUM Earmark. Selain itu, anggaran infrastruktur mendapat alokasi anggaran dari Pusat (Dana Alokasi Khusus) dan Provinsi (Bantuan Keuangan);
3. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan penduduk dalam membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia



4. Kemiskinan masih menjadi salah satu hal yang harus dientaskan oleh Pemerintah Kab. Mahakam Ulu. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, keterlibatan swasta dan pemerintah dengan meningkatkan investasi dan peluang 360 pekerjaan, penguatan sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil serta peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan manusia unggul menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan;
5. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menekan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat, maka sektor usaha mikro dan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi lokal di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dilakukan adanya kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan pemberdayaan baik bagi SDM pengelola koperasi maupun stakeholders yang terkait dengan sektor tersebut;
6. Berkaitan dengan aspek ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu menyusun regulasi CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah), menetapkan besaran CPPD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, adanya fasilitasi sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung keberlanjutan kegiatan lumbung, menjamin ketersediaan pangan melalui akses pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Sektor perekonomian di Kabupaten Mahakam Ulu perlu melalui penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RKPSD tahun 2024, yaitu pembangunan pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agribisnis, yang tentunya didukung oleh berbagai sektor, yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa, dan pertanian secara luas, agar dapat mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;



8. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat memperhatikan aspirasi dan usulan dari masyarakat dan memperhatikan aspek kelingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat; dan
9. Guna meningkatkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu secara berkala, serta adanya peningkatan fasilitasi sarana dan prasana keamanan masyarakat.



LAMPIRAN



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E
Jabatan : BUPATI MAHAKAM ULU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ujoh Bilang, 05 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E



**BUPATI MAHKAMAH ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 060/
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Perjanjian Kinerja
Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024

Ujoh Bilang, 05 Januari 2024

Kepada,
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka dengan ini kami sampaikan data Perjanjian Kinerja Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

BUPATI MAHKAMAH ULU



BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH., M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth:
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur – Di Samarinda



**BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS 1 2	INDIKATOR KINERJA 3	SATUAN	TARGET	
				4	5
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	5	
2.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	%	28,00	
3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik	%	96,01	
4.	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	94	
5.	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	22,43	
6.	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	%	64,91	
7.		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	93,12	
8.		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	%	100	
9.	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	%	75,80	
10.	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	%	21,19	
11.	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Miliar)*	Dalam Miliar	3.168,217	
12.	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	%	9,83	

Jl. Pores Ujoh Bilang - Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun 75767
email: info@mahakamuluakab.go.id website: www.mahakamuluakab.go.id



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
13.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,33
14.	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,87
15.		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,10
16.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	72,50
17.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,25
18.	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	Predikat	WTP
19.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	Desa	8
20.		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	11

Ujoh Bilang, 5 Januari 2024

BUPATI MAHKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E